

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendekatan-pendekatan awal terhadap studi gerakan-gerakan sosial bersumber dari ulasan-ulasan psikologi sosial fungsional tentang perilaku massa. Titik tolak analisis tersebut adalah asumsi bahwa keseimbangan sistem merupakan suatu kondisi sosial yang natural. Dari perspektif ini, masyarakat secara organis menghasilkan infrastruktur kelembagaan yang mengatur keseimbangan antara masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*) dalam sistem politik. Tuntutan-tuntutan sosial diakomodasi oleh lembaga-lembaga yang responsif yang menyalurkan dan menangani begitu banyak kepentingan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang optimal. Kebijakan-kebijakan ini, nantinya, meredakan berbagai tuntutan dan berfungsi memelihara keseimbangan sistem tersebut. Bagi kaum fungsionalis, ketidakseimbangan sistem bersumber dari ketegangan-ketegangan struktural eksogen yang menghasilkan ketidakpuasan baru dan mengikis efisiensi lembaga-lembaga, menghasilkan disfungsi-disfungsi patologis yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Jika kemampuan kelembagaan tidak dapat mengakomodasi tuntutan-tuntutan baru masyarakat, akibat yang muncul adalah ketegangan sosial dan kekacauan politik.<sup>1</sup>

ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>1</sup>Samuel P Huntington. *Political Order in Changing Societies*. (New Haven Conn.: Yale University Press, 1968), h., 57

Logika pendekatan sosio-psikologis tersebut mendominasi banyak karya kesarjanaan tentang aktivisme Islam. Bagi banyak sarjana, motivasi dasar yang mendorong aktivisme bersumber dari krisis-krisis struktural yang dihasilkan oleh kegagalan proyek modernisasi.<sup>2</sup> Selama masa keemasan *developmentalisme*, para pemimpin di negara-negara Muslim, khususnya di Timur Tengah, mengadopsi model-model modernisasi barat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Para elite yang digembleng dalam sistem-sistem pendidikan barat sering kali melihat modernisasi dan westernisasi sebagai bagian dari suatu proses yang sama, dan karena itu tidak hanya mendukung kebijakan-kebijakan industrialisasi, melainkan juga pelaksanaan praktik-praktik Barat, termasuk gaya berpakaian, sekularisasi, dan bahasa-bahasa barat. Bahkan, di negara-negara yang lahir dari konfrontasi keras dengan kekuasaan-kekuasaan barat, para elite sering kali mengadopsi ciri-ciri budaya barat, meskipun mereka meneriakkan retorika anti-barat. Inilah yang terjadi khususnya di Afrika Utara, di mana elite yang berkuasa lebih memilih untuk berbicara dengan bahasa Prancis. Meskipun minoritas kecil ini menyimpang dari arus besar budaya masyarakatnya sendiri, rezim berusaha untuk menentramkan populasi mereka dengan menjanjikan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran nasional, dan perlindungan sosial.<sup>3</sup>

Pejuang DI/TII menyebut perjuangan mereka jihad, sementara pemerintah Indonesia menyebut mereka *bughot* (pemberontak). Padahal kalau merunut sejarah Aceh, sejak masa kesultanan sampai datangnya bangsa barat, perjuangan jihad di Aceh terus berkobar, melawan berbagai bentuk kolonialisme, mulai dari Portugis, Belanda hingga Jepang. Bahkan, menurut Anas Machmud, Ketua Jurusan Sejarah IKIP Sumatera Utara tahun 80-an, Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda.<sup>4</sup> Bergabungnya Aceh dengan Republik Indonesia didukung oleh

---

<sup>2</sup>Waltz Susan. "Islamist Appeal in Tunisia." Dalam *Middle East Journal* 40, 4 (Musim Gugur): h. 651-670.

<sup>3</sup>Dekmejian R. Hrair. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. 2d ed.* (Syracuse, NX: Syracuse University Press, 1995), h., 67

<sup>4</sup>Anas Machmud, *Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bagian dari Kedaulatan Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1988), h. 42. Lihat juga makalah Prof. A. Hasjmy dalam Seminar Sejarah Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai *Kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan di Medan*, 1976, h. 22-29. Makalah itu berjudul "Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan." Kenyataan sejarah yang penting artinya

berbagai kalangan seperti ulama, para pedagang, kaum intelektual, dan masih banyak unsur lainnya yang menginginkan Aceh bergabung dengan NKRI. Tetapi selama bergabung dengan Republik Indonesia beberapa unsur keIslaman yang selama ini dilestarikan dan dijaga baik oleh orang rakyat Aceh lambat laun sirna. Hukum Islam yang sudah digunakan rakyat Aceh sejak tahun 1512 sampai Belanda terusir dari Aceh diganti dengan menggunakan hukum dasar negara Republik Indonesia yang berbeda dengan Islam. Sehingga hal ini merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik di Aceh.<sup>5</sup>

Tepatnya pada tanggal 21 September 1953 berdirilah Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh untuk menentang kezaliman Soekarno secara khusus dan Indonesia secara umum.<sup>6</sup> Gerakan yang bergabung dengan DI/TII Karto Suwiryono di Jawa Barat telah menguasai Aceh 90 persen di awal pergerakannya. Beberapa tahun setelah pergerakan terjadi perdamaian dan Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh. Namun, karena ada hal lebih prinsipil DI/TII Aceh dan Jawa Barat, September 1955 DI/TII Aceh digantikan Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII). Lewat usaha Dewan Revolusi yang memediasi perdamaian tersebut yang dimotori oleh Hasan Saleh dan tidak lama kemudian Abu Beureueh turun gunung pada tanggal 9 Mei 1962.<sup>7</sup>

Berdasarkan catatan sejarah bahwa Teungku Hasan Muhammad Di Tiro telah mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Usaha ini dilakukan untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Aceh. Hasan Tiro juga mendapat dukungan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh meskipun secara sembunyi-sembunyi. Hasan Tiro adalah murid setianya Teungku Muhammad Daud Beureueh, tetapi dalam konteks pemikiran Negara Islam Aceh sangat jauh

---

ialah, bahwa Sultan yang berada dalam tawanan Belanda tetap mengadakan perlawanan dengan mencoba membuat hubungan dengan Kaisar Jepang. Walaupun hubungan itu tidak ada hasilnya secara fisik, tetapi politis hal itu berarti bahwa Sultan tidak mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh dan pembuangan Sultan ke Ambon tahun 1907, kemudian 1918 dibindahkan ke Betawi, adalah bukti sejarah yang paling berharga bahwa Sultan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda.

<sup>5</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1997), h. 11.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 11.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 15.

berbeda. Hasan Tiro menginginkan dasar negara yang nasionalis supaya mudah mendapat bantuan negara barat, sedangkan Teungku Muhammad Daud Beureueh menginginkan dasar negara Islam. Faktor inilah yang membuat Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak simpatik dengan Hasan Tiro dan kemudian Teungku Muhammad Daud Beureueh ditangkap oleh pemerintah Orde Baru. Karena merasa bahwa Islam tidak mendapat tempat dimata masyarakat internasional, Hasan Tiro mengubah strategi perjuangannya dengan menciptakan pemikiran-pemikiran dengan segala intrik politiknya membentuk Negara Federal dalam demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Pada Desember 1976 dr. Muktar menyampaikan kepada Husaini Hasan secara rahasia, bahwa Tengku Hasan M. di Tiro sudah pulang dan kini berada di rimba Aceh. dr. Muktar menambahkan telah menjumpai Tengku Hasan M. di Tiro pada November 1976. dr. Muktar berbicara banyak hal saat pertemuan tersebut bahkan komitmen Husaini Hasan terhadap perjuangan kedaulatan Aceh. Husaini Hasan mendengar cerita dari dr. Muktar bahwa Tengku Hasan M. di Tiro menyampaikn salam kepada Husaini Hasan. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi Husaini Hasan ketika mendapat salamdari seorang inisiator Aceh Merdeka. Menurut dr. Muktar, Husaini Hasan sudah dijadwalkan untuk bertemu Tengku Hasan M. di Tiro dipersembunyiannya. Pada Januari 1976, Husaini Hasan berjumpa dengan Tengku Hasan M. di Tiro di rimba Aceh. Husaini Hasan berpikir besarnya mega proyek LNG Arun sudah diketahui khalayak umum, jika dipantau dari udara, lapangan LNG merupakan proyek terbesar di Sumatera. Bahkan dalam harian Jakarta Post dijelaskan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari LNG Arun.<sup>9</sup>

Setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1977, Hasan Tiro menjalankan roda organisasi GAM, membentuk sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), membentuk kabinet, dan ia sendiri duduk sebagai Wali Negara. Hasan Tiro mentransformasikan pemikirannya melalui indoktrinasi

---

<sup>8</sup>Neta. S. Pane, *Sejarah...*, h.72.

<sup>9</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*. (Jakarta: Batavia Publishing. 2015), h. 30

ideologi yang sangat intens dalam tubuh GAM. Diantara pemikirannya bagaimana mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa kesultanan Aceh yang pernah berjaya dahulu, mengajari rakyat Aceh kesadaran berpolitik, memobilisasi dengan gagasan politiknya yang anti Indonesia. Tetapi di sisi lain, terjadi kontroversi atas pemikiran Hasan Tiro, sehingga faksi GAM terpecah menjadi dua. Ada beberapa gagasan politik Hasan Tiro yang menurut para pengikutnya telah jauh dari konsep perjuangan GAM itu sendiri, misalnya merubah isi proklamasi berdirinya GAM, mengklaim Sumatera menjadi wilayah kekuasaan, mengembalikan bentuk Aceh pada sistem kerajaan pada masa lalu, tentang bendera, bahasa persatuan, dan merubah konsep perjuangan ulama Aceh. Indikator diatas membuat para pengikut Hasan Tiro berpikir ambigu dalam melanjutkan perjuangan GAM itu sendiri. Sehingga tergerak hati dr. Husaini M. Hasan untuk berjuang dan terlibat dalam generasi pertama yang mendirikan Aceh Merdeka yang hari ini diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Husaini M. Hasan meninggalakan kehidupan yang sudah lumayan baik sebagai seorang dokter dari Universitas Sumatera Utara, beliau juga meninggalkan keluar tercinta, meninggalkan orang tua beliau, istri dan anak-anak beliau yang masih kecil, namun beliau lebih memilih berjuang mempertahankan kedaulatan Aceh dan bergabung dengan M. Hasan Di Tiro. Jika dilihat lebih jauh Husaini M. Hasan rela berpindah-pindah tempat di hutan, mengalami malaria serta mengalami berbagai macam kondisi yang tidak enak jika dibandingkan dengan kehidupan beliau sewaktu menjadi dokter di Sumatera Utara dan juga di beberapa perusahaan internasional yang ada di Aceh seperti Arun NGL serta juga dokter di Exxon Mobiloil. Karena sikap nasionalisme beliau rela meninggalkan semua demi Aceh yang pada akhirnya Husaini M. Hasan dilupakan begitu saja ibarat kacang lupa pada kulitnya.<sup>10</sup>

Pada tanggal 14 Agustus 1980 Husaini M. Hasan di Malaysia semakin tidak jelas arahnya, ada berita yang memberitahukan bahwa Interpol Indonesia telah mencium keberadaan Husaini M. Hasan di Malaysia dan melalui kerja sama dengan Interpol Malaysia untuk mencari tahu dimana Husaini M. Hasan bersembunyi. Husaini M. Hasan telah mengetahui berita tentang pencarian dirinya oleh pihak Interpol dari kawan-kawan yang ada di Malaysia. Keadaan yang

---

<sup>10</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*, h. 35

semakin mambahayakan bagi Husiani M. Hasan ketika beliau berada di Malaysia sehingga memutuskan untuk mencari bantuan kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dimana Husiani M. Hasan sebelumnya telah menyimpan alamat kantor UNHCR yang didapatkannya dari *Majalah Asia Week*.<sup>11</sup>

Husiani M. Hasan menuliskan surat yang ditujukan kepada Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro dimana isi surat yang ditulis oleh Husiani M. Hasan memberitahukan bahwa Husiani M. Hasan tidak dapat bertahan di Malaysia terlalu lama, sehingga Husiani M. Hasan meminta izin agar dapat memohon bantuan kepada UNHCR. Serta akhirnya Husiani M. Hasan mendapatkan izin dari Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro untuk datang ke kantor UNHCR di jalan Petaling Kuala Lumpur untuk bertemu dengan Mr. Mc. Namara, serta Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro juga memberitahu bahwa beliau sudah menghubungi UNHCR di Jenewa serta telah membicarakan nasib Husiani M. Hasan di Malaysia. Namun dilain pihak Malik Mahmud meminta kepada Husiani M. Hasan supaya dapat menunda niat untuk datang ke kantor UNHCR.<sup>12</sup>

Pada bulan Juni Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro memutuskan Husiani M. Hasan dan Bakhtiar Abdullah mengikuti kursus jurnalistik di *The City University*, London. Pada tahun ini hubungan Husiani M. Hasan dengan *Muslim Institute* sangat. Selama di London Husiani M. Hasan diperkenalkan dengan Dr. Kalim Siddique dan Ir. Ghayasuddin yang merupakan President dan Wakil President *Muslim Institute*. Husiani M. Hasan juga ikut membantu pelaksanaan seminar internasional “*What is the future for Pakistan*”. Pada Maret 1992 Husiani M. Hasan mengumpulkan orang Aceh yang ada di Sydney untuk mendirikan komunitas masyarakat Aceh di Sydney yang kemudian diberi nama *Australian Achehnese Association* (AAA). Dalam kesempatan itu Husiani M. Hasan juga mengatakan bahwa masyarakat Aceh sudah berada dalam era baru dengan berhasilnya mendapatkan status *political refugee* dari UNHCR, dengan adanya pengakuan dari UNHCR berarti dunia mengakui di Aceh terjadi konflik politik antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya tidak pernah

<sup>11</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*, h. 45

<sup>12</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*, h. 49

ada orang Aceh yang berkomunikasi dengan pihak UNHCR serta tidak ada orang Aceh yang meminta suaka politik kepada UNHCR.<sup>13</sup>

Husaini M. Hasan memutuskan untuk sementara waktu berhenti bekerja di Skovde, lalu kembali ke Flen mengurus anggota Aceh Merdeka yang mendapat suaka politik ke Swedia. Selama di Flen, Husaini M. Hasan diterima sebagai penerjemah bahasa Svenska, Aceh, Melayu, dan Inggris di AMS Forlaggningen. Tugas Husaini M. Hasan menerima kedatangan mereka yang dikirim melalui UNHCR Malaysia. Alhamdulillah, UNHCR menepati janjinya yang mereka ucapkan saat Husaini M. Hasan masih di Kuala Lumpur. Pertemuan ini dihadiri utusan dari Aceh seperti Aguswandi dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Radhi Darmansyah dari Farmidia, Ghazali Abbas anggota MPR III, Ibrahim Abdullah sahabat Tengku Hasan M. di Tiro di Amerika Serikat, Prof. Dr. Lukman Thaib dari UKM Kuala Lumpur serta masyarakat Aceh yang tinggal di Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Dalam sebuah pertemuan, Husaini M. Hasan berpidato dengan judul "*The Future Integration of Indonesia: Focus on Aceh*" bahwa otonomi untuk Aceh itu adalah barang basi yang sudah beberapa kali diberikan kepada rakyat Aceh sebagai bentuk memadamkan dan penyelesaian konflik DI/TII. Sebelumnya otonomi untuk Aceh diberikan dengan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan seterusnya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Husaini M. Hasan yakin, Aceh tidak ingin ada lagi penjajahan di zaman ini dalam bentuk apapun. Aceh ingin merdeka dan duduk sederajat dengan semua bangsa di dunia. Husaini M. Hasan tidak menginginkan Indonesia pecah seperti Uni Soviet, Yugoslavia di Balkan. Indonesia sebaiknya diganti bentuk dari Negara Kesatuan menjadi Negara Persatuan atau Persatuan Negara-negara Nusantara, dengan kata lain *United States of Nusantara* (USN) atau tetap menggunakan nama Indonesia dengan menambahkan kata "*Union*" menjadi *Union Republics of Indonesia* yang terdiri atas Persatuan Bangsa-bangsa Melayu dan Melanesia di teritorial Indonesia sekarang ini.

---

<sup>13</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*, h. 52

<sup>14</sup>Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*, h. 57

Persatuan ini bukan sebagai bentuk federasi tetapi konfederasi (*confederation*) seperti Model Uni Eropa. Masing-masing negara mempunyai pemerintah dan parlemen sendiri. Bendera, bahasa dan Presidennya sendiri. Mereka bersatu dalam hal ekonomi, pertahanan, Politik zone Asia Tenggara dan lain-lain. Tetapi tetap saling menghormati dan menjaga identitas kebangsaan dan kebudayaan. Permasalahan Aceh dengan Indonesia dan perpecahan kubu GAM klimaks menimbulkan banyak yang semakin dari berbagai pihak. Di tengah-tengah kemelut tersebut, Ketua *Henry Dunant Centre* (HDC) Mr. Martin Griffith dan Sekretarisnya DR. Louiza terbang khusus ke Stockholm untuk bertemu saya. Saya mengajak Yusuf Daud dan Hafiz bertemu perwakilan HDC ini di Hotel Sheraton.

Mr. Griffith menegaskan organisasi-organisasi kemanusiaan sedunia termasuk Amerika Serikat dan Eropa mendorong HDC berinisiatif menyelesaikan konflik Aceh dengan Indonesia di meja perundingan. HDC berperan sebagai mediator. Mereka paham bahwa GAM terpecah menjadi dua kubu dan mereka akan menghubungi dua kubu yang ada untuk ikut dalam perundingan tersebut. HDC mengusulkan tempat perundingan di Davos, Jenewa. Husaini M. Hasan menghubungi Prof. Kiwimaki di Finlandia dengan harapan mau menjadi mediator. Prof. Kiwimaki pernah bekerja di Nordic Institute for Asian Studies. Prof. Kiwimaki juga penasihat Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Prof. Kiwimäki pernah ke Kantor MB GAM dan mengatakan tentang kemungkinan Finlandia menjadi mediator penyelesaian konflik Indonesia dan GAM. Prof. Kiwimaki menawarkan dirinya untuk menghubungi presiden Finlandia. Berdekatan dengan rencana itu, Husaini M. Hasan mendapat undangan menghadiri Kongres *Organization Islamic Conference* (OIC) untuk *European Moslem* di Malmo. Dalam pertemuan itu Husaini M. Hasan bertemu menteri Pendidikan Libya, H.E. DL Muhammad Syarif, Husaini M. Hasan tidak menyia-nyaiakan kesempatan ini untuk menanyakan kemungkinan Libya menjadi mediator GAM dengan Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Husaini M. Hasan selaku sumber primer didalam penelitian ini. Tokoh Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Wawancara dilakukan melalui e-mail, 04 Desember 2021 pukul 09:25.

Husaini M. Hasan mengusulkan kepada Mr. Griffith untuk menyampaikan kepada Malik Mahmud dan dr. Zaini Abdullah agar menyediakan waktu satu hari untuk membicarakan strategi bersama sebelum berunding dengan Indonesia. Husaini M. Hasan mengusulkan HDC memanggil tokoh masyarakat Aceh untuk hadir di Jenewa sebagai perwakilan masyarakat Aceh di dalam negeri. Husaini M. Hasan mengusulkan lima nama sebagai *representatif* yakni Tengku Ibrahim Panton mewakili golongan ulama (HUDA), Muhammad Nazar mewakili mahasiswa (SIRA), Otto Syamsuddin Ishak mewakili NGO, Dr. Abdullah Ali mewakili golongan intelektual (Unsyiah) dan Ghazali Abbas mewakili elite Aceh. HDC menyambut baik usulan itu dan segera merealisasikannya, Husaini M. Hasan berinisiatif menelepon Menteri HAM Republik Indonesia, Hasballah M. Sa'ad di Jakarta meminta bantuan pengurusan paspor dan fasilitas untuk kelima utusan dari Aceh tersebut hingga mereka bisa berangkat ke Jenewa untuk memperkuat tim perundingan Aceh. Husaini M. Hasan mengundang Dr. Chalidin Yakob dari Australia dan Prof. Lukman Thaib dari Kuala Lumpur untuk terbang ke Swedia dan bersama-sama ke Tripoli menunggu kepastian akhir, apa Libya bersedia menjadi mediator atau tidak. Husaini M. Hasan bersama Dr. Chalidin Yakob dan Prof. Lukman Thaib terbang ke Tripoli untuk memastikan perundingan selanjutnya dengan Indonesia. Sementara itu Saiful Islam Khadafi (putra Khadafi) terbang ke Jakarta untuk melakukan pembicaraan dengan Indonesia.

Perjuangan GAM Tengku Hasan Muhammad di Tiro adalah perjuangan Negara Aceh Sumatera yang berkonstitusi berdasarkan Hukum Syariah Islam berdasarkan mazhab Syafiiyah. Dengan diberinya hak menjalankan Syariat Islam dalam Pemerintahan Provinsi Aceh maka maksud dan tujuan perjuangan GAM sudah mendekati 75% tercapai. Harapan dan *way of life* rakyat Aceh dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat secara syariah Islam sudah hampir terpenuhi dengan kondisi Pemerintah pusat yang sekuler tidak mencampuri atau mengintervensi implementasi dari pelaksanaan Syariah Islam secara kafah di Provinsi Aceh. Jadi ini tergantung kepada kepemimpinan Aceh untuk kommit

dan konsistensi meneruskan dan mempertahankan agar sistem Syariah Islam menjadi konstitusi di Provinsi Aceh dan benar-benar dipraktekkan secara kafah.<sup>16</sup>

Konsep Negara Islam yang diperjuangkan adalah Negara Islam yang merdeka dan berdaulat atas bumi Aceh sebagai *successor State* mengembalikan kembali Kedaulatan Negara Aceh seperti sebelum invasi penjajahan Belanda tahun 1873. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada masa Pemerintahannya 10 November 1999. Beliau sebagai seorang pemimpin Islam menyetujui konsep yang diusulkan untuk membentuk satu basis Pemerintahan Islam di Aceh untuk menjadi barometer NKRI yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kapasitas (85-90%) pada masa itu, tetapi pemerintahannya tidak berdasarkan konstitusi Islam. Sewaktu-waktu bisa didominasi oleh minoritas non-muslim seperti di Negara-negara sekuler lainnya di dunia.<sup>17</sup>

Studi-studi tokoh yang ada selama ini dilakukan dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai bagian dari pendekatan sejarah (*historical approach*), ia disinggung secara sepintas dalam berbagai penjelasan metode penulisan bidang sejarah. *Kedua*, studi ini seringkali dikelompokkan pada bidang yang dibicarakan tokoh yang bersangkutan. Pengelompokan semacam ini ternyata mengalami kesulitan dalam penanganannya, sebab suatu studi tokoh memerlukan analisis-analisis khusus, yang tidak semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan bidang ilmu yang dibicarakannya.<sup>18</sup>

Dalam perspektif filsafat ilmu, keabsahan studi tokoh sebagai salah satu metode penelitian, dapat dianalisis dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis studi tokoh bersifat alamiah (dijelaskan apa adanya), induktif (dijelaskan data yang diperoleh dari seorang tokoh), mempertimbangkan etik dan emik, serta *verstehen* (peneliti dapat menggali pikiran, perasaan, dan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Husaini M. Hasan selaku sumber primer didalam penelitian ini. Tokoh Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Wawancara dilakukan melalui e-mail, 04 Desember 2021 pukul 09:25.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Husaini M. Hasan selaku sumber primer didalam penelitian ini. Tokoh Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Wawancara dilakukan melalui e-mail, 04 Desember 2021 pukul 09:25.

<sup>18</sup>Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), h., 5

motif yang ada di balik tindakan sang tokoh). Dari sudut epistemologi studi tokoh dilakukan dengan pendekatan historis, *sosio-cultural-religius* (tidak melepaskannya dari konteks sosio-kultural dan agama sang tokoh) dan bersifat kritis-analisis. Sedangkan dari sudut aksiologis studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan, bahan intropeksi bagi tokoh-tokoh belakangan, dan memberi sumbangan bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Salah satu peneliti ketika hendak melakukan studi tokoh adalah melihat kelayakan orang yang hendak ditelitinya untuk dijadikan objek penelitian studi tokoh.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan sejarah Aceh di atas, terjadi transformasi perjuangan perlawanan. Dari perjuangan mendikikan negara Islam yang diagaungkan oleh DI/TII bergeser menjadi perjuangan nasionalisme kesukuan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dari perjuangan syariah dan Darul Islam menjadi perjuangan nasionalisme Aceh. Sehingga *Aceh Islamic State* ini menjadi menarik untuk dikaji, dikarenakan *Aceh Islamic State* ini menjadi cita-cita perjuangan yang dari masa DI/TII atau perjuangan darul Islam yang dipelopori oleh Tengku Daud Beureueh, sampai kepada perjuangan Tengku Hasan Muhammad di Tiro masih tetap bercita-cita mewujudkan *Aceh Islamic State*. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa layak untuk melakukan kajian dalam bentuk tesis dengan judul: **“Pemikiran Dan Aktivisme Politik Husaini M. Hasan Tentang Aceh Islamic State.”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari perluasan kajian dan timpang tindih istilah dalam peneltian ini, penulis membuat beberapa limitasi kajian penelitian, agar alur narasi selaras dan terfokus, sehingga memudahkan peneliti untuk mengupas dan mengelaborasi uraian. Batasan-batasan istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh (Pemikiran Islam)*, h., 8

## 1. Pemikiran

Pemikiran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai cara atau hasil berfikir. Berasal dari kata dasar “pikir”, yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dengan mendapatkan imbuhan pe-an dalam tata Bahasa Indonesia menunjukkan suatu atau perbuatan, maka “pemikiran” dapat diartikan cara atau hasil berfikir terhadap sesuatu, sehingga melahirkan gagasan, ideide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan.<sup>20</sup> Sehingga pemikiran dalam tulisan ini yang ingin penulis menganalisis mengenai pemikiran Husaini M. Hasan tentang *Aceh Islamic State*.

## 2. Aktivisme

Aktivisme berasal dari kata “aktif” sebuah kata dengan makna yang sangat luas, mulai dari terlibat dalam aksi, partisipasi, sibuk, bergerak, sesuatu yang melibatkan usaha, sampai sesuatu yang menyebabkan perubahan atau berpengaruh. Bentuk aktivisme yang sering dikenal biasanya berupa aksi langsung; seperti kampanye, protes, boikot, demonstrasi, pemogokan, dan lain-lain. Namun, banyak juga bentuk aktivisme yang dapat dilakukan sehari-hari seperti membentuk komunitas, mempromosikan gagasan atau pesan melalui tulisan atau mediummedium kreatif lainnya, menulis surat atau petisi, menghadiri pertemuan atau diskusi publik, dan masih banyak lagi. Meski ada banyak cara untuk melakukan aktivisme, secara umum kita dapat bersepakat bahwa kita melakukan aktivisme untuk mewujudkan perubahan yang kita inginkan, mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan besar yang mungkin membutuhkan usaha dan dukungan dari banyak pihak.<sup>21</sup>

## 3. Aceh Islamic State

Teungku Muhammad Daud Beureu’eh berinisiatif tetap melanjutkan jihad suci menegakkan syariat Islam dan negara Islam di bumi Aceh. Pemerintah RI, dalam pandangan masyarakat Aceh, kembali menampakkan belang yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang anti akan Islam, akan tetapi bagi

<sup>20</sup>*Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik* (Pusat Bahasa, 2008)

<sup>21</sup>*Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik* (Pusat Bahasa, 2008)

para *mujahidin* Aceh, cita-cita Darul Islam merupakan tujuan hidup yang abadi.<sup>22</sup> *Aceh Islamic State* atau yang dikenal pada zaman itu negara Islam Aceh ini merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Namun dalam realisasinya mengalami hambatan serta banyak rintangan yang dihadapi oleh pihak Aceh termasuk dalam hal ini Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, sehingga cita-cita ini kembali dilanjutkan oleh penerus beliau yakni Muhammad Hasan di Tiro dan jajaran Gerakan Aceh Merdeka, termasuk salah satunya yakni Husaini M. Hasan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

Bagaimana Pemikiran dan Aktivisme Husaini M. Hasan tentang *Aceh Islamic State*? Masalah tersebut dirincikan dalam submasalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemikiran Husaini M. Hasan?
- b. Bagaimana aktivisme politik Husaini M. Hasan?
- c. Apa yang dimaksud dengan *Aceh Islamic State* menurut Husaini. M. Hasan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara spesifik untuk menganalisis secara mendalam tentang:

1. Untuk menganalisis pemikiran Husaini M. Hasan.
2. Untuk menganalisis aktivisme politik Husaini M. Hasan.
3. Untuk menganalisis *Aceh Islamic State* menurut Husaini. M. Hasan.

---

<sup>22</sup>Mawardi Umar & Al Chaidar, *Darul Islam Aceh Pemberontakan atau Pahlawan*, (Banda Aceh: Asri Jaya Manunggal, 2006), h., 185

### E. Kajian Terdahulu

Pertama, C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*. Karya ini menjelaskan tentang kelahiran Darul Islam dan pemberontakannya di berbagai daerah di Indonesia. Van Dijk mengemukakan mengapa rakyat bergabung dengan Darul Islam. Khusus tentang pemberontakan Darul Islam di Aceh dijelaskan di bab enam, Aceh, Pemberontakan Para Alim Ulama. Van Dijk berkesimpulan bahwa pemberontakan Darul Islam bisa bertahan sangat lama karena mendapat dukungan besar dari rakyat, yang disebabkan oleh dua faktor. Yaitu, pertama, kebencian akan bertambahnya pengaruh Tentara Republik dan kaitannya dengan rendahnya posisi penempatan pasukan gerilya liar, bersama dengan politik demobilisasi Pemerintah Republik kemudian. Kedua, bertambahnya pengawasan Pemerintah Republik atas provinsi-provinsi segeerah sesudah kemajuan Tentaranya, sejalan dengan upayanya untuk membina pamong praja yang set dan efisien. Perasaan tidak senang antara Pemerintah Pusat dan rakyat daerah ditambah dengan perbedaan kepentingan ekonomi masing-masing.<sup>23</sup>

Kedua, Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*. Dalam kesimpulannya tentang politik pemikiran Islam, Munawir berpendapat bahwa, politik Islam pada akhir abad ke-19 telah mengalami perubahan, perkembangan pluralitas dalam berpikir tentang keterkaitan antara agama dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor baru yang menjadi tantangan umat Islam; pertama, kemunduran dunia Islam dari internalnya sendiri. Kedua, tantangan bangsa-bangsa Eropa dalam integrasi politik dan teritori ke dalam dunia Islam yang diakhiri dengan dominasi dan kolonialisasi. Terakhir, superioritas Eropa dalam sains, teknologi dan organisasi.<sup>24</sup>

Tiga faktor ini melahirkan tiga kelompok pemikir muslim. *Pertama*, kelompok tradisional yang menolak Barat dan semua konsep-konsepnya. *Kedua*, kelompok yang berpendapat Islam sama dengan agama lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan politik dan ekonomi diserahkan

---

<sup>23</sup>C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*, terj. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1987), h., 78

<sup>24</sup>Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: teaching, history, and reflection*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies [INIS], 1991), h., 86

kepada ummat. Kelompok terakhir, berbeda dengan dua kelompok lainnya dan berpendapat bahwa Islam punya prinsip dasar dan nilai etik dalam menetapkan kehidupan. Mengenai sistem yang dipakai bisa mengadopsi dari system lain yang sejalan dengan nilai dan prinsip Islam.

Terdapat juga Tesis yang ditulis oleh Eric Eugene Morris, yang berjudul *Islam dan Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*. Tesis Eric ini lebih menekankan pada hubungan antara pusat (negara) sebagai sebuah kekuatan baru di Aceh dengan kekuatan lokal Islam. pada kesimpulannya, Eric mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin aceh menganggap bahwa pemerintah pusat telah gagal dalam mengakomodasi keinginan aceh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam.<sup>25</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti dimana peneliti adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>26</sup>

Menurut Moleong, bahwa jenis pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu makna peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Eric Eugene Morris, Tesis, *Islam dan Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*, (Michigan: University Microfilm International, 1983), h., 36

<sup>26</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2009), h., 15

<sup>27</sup>Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010), h., 3

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.<sup>28</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, agama sangat urgen dalam hal itu. Perkara itu supaya tidak dijawab dengan khotbah saja melainkan juga secara konseptual menunjukkan cara-cara efektif dalam memecahkannya. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologi dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain, yang secara operasional konseptual, dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.

Menurut Jalaludin Rahmat agama dapat diteliti dengan berbagai paradigma, diantaranya ialah: Pendekatan Normatif (*Normative Approach*),<sup>29</sup> Pendekatan Antropologis (*Antropological Approach*),<sup>30</sup> Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*),<sup>31</sup> Pendekatan Fenomenologi (*Phenomenology Approach*),<sup>32</sup> Pendekatan Historis (*Historical Approach*),<sup>33</sup> Pendekatan Politis

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h., 10

<sup>29</sup>Pendekatan Normatif merupakan pandangan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Lihat, Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, cet. 2, 2018), h. 163.

<sup>30</sup>Pendekatan Antropologis merupakan pandangan yang memandang agama dari segi dasar-dasar kebudayaan masyarakat. *Ibid.*,...h. 165.

<sup>31</sup>Pendekatan Sosiologis melihat agama dari segi interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam satu kesatuan di masyarakat. *Ibid.*, h. 167.

<sup>32</sup>Pendekatan Fenomenologi merupakan suatu pendekatan atau mendeskripsikan keilmuan yang berusaha mencari makna hakikat atau esensi dari apa dibalik segala macam agama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Pendekatan ini juga berfungsi melihat peran agama dalam sejarah dan kebudayaan. *Ibid.*, h. 171.

(*Political Approach*),<sup>34</sup> Pendekatan Psikologis (*Psychology Approach*),<sup>35</sup> Pendekatan Interdisipliner.<sup>36</sup>

Dari berbagai macam jenis pendekatan ilmu sosial di atas, dalam penelitian Tesis ini peneliti menggunakan Pendekatan Politis (*Political Approach*), dikarenakan penelitian ini dapat melihat paradigma atau sudut pandang dari kontribusi Husaini M. Hasan dalam mewujudkan pemikiran dan aktivisme politik untuk mewujudkan *Aceh Islamic State*. Dari berbagai macam jenis pendekatan ilmu sosial di atas, dalam penelitian Tesis ini peneliti menggunakan Pendekatan Politik (*Political Approach*), dikarenakan penelitian ini dapat melihat paradigma atau sudut pandang dari kontribusi Husaini M. Hasan dalam mewujudkan *Aceh Islamic State*. Dari segi keberadaannya pendekatan politis terbagi terbagi menjadi lima bagian:

*Pertama*, pendekatan politik dekonfessionalisasi. Pendekatan politik ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan kelompok heterogen yang berbeda pandangan tentang sesuatu yang bersifat positif untuk menggapai cita-cita kemajuan bersama dalam sebuah komunitas besar atau negara. Pendekatan di atas dapat dipahami bahwa pendekatan dekonfessionalisasi adalah tidak taklid buta terhadap pahamnya sendiri sehingga menutup paham-paham yang lain, hal ini bisa berdampak merasa benar sendiri dan yang lain salah. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan maka setiap perbedaan tidak dijadikan sebagai titik pisah antara satu sama yang lain. Misalnya Pancasila (*The Five Principles*) telah dirumuskan oleh bapak pendiri bangsa (*founding father*)

---

<sup>33</sup>Pendekatan Sejarah adalah mengkaji Islam dari berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam pendekatan ini jika dilihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, cet. 4, 2014), h. 45.

<sup>34</sup>Pendekatan Politis adalah suatu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian di masyarakat. Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*,... h.179.

<sup>35</sup>Pendekatan Psikologis merupakan pendekatan memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan melihat gejala perilaku yang diamati. Kalau dalam Islam seperti penggambaran iman dan taqwa kepada Allah swt. *Ibid.*, h. 180.

<sup>36</sup>Pendekatan ini merupakan kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan normatis secara bersamaan. *Ibid.*, h. 169.

yang berhasil mereka sepakati melalui perdebatan yang panjang. Pancasila berhasil mempersatukan anak bangsa yang heterogen. Pancasila merupakan kreasi para ulama untuk mempersatukan anak bangsa yang heterogen dalam satu tujuan yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena unsur-unsur yang terdapat dalam pancasila itu merupakan nilai-nilai ajaran Islam seperti, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan.<sup>37</sup>

*Kedua*, pendekatan politik domestikasi Islam. Teori ini menggambarkan Islam sebagai agama yang terbesar dianut oleh orang Indonesia, namun perkembangannya tergabung dengan kebudayaan dan tradisi lokal masyarakatnya. berkembang. Menurut Harry J. Benda dalam Daniel Nakhada, berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukanlah Islam itu sendiri.

*Ketiga*, pendekatan politik skismatik dan aliran. Robert Jay dan Clifford Goerta adalah orang yang mengembangkan teori ini. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan di luar Islam akan terus berhadapan dengan kepercayaan lain, sehingga ada dua konsekuensi, Islam menang atau kalah dalam menjawab tantangan itu, Priai dan Abangan adalah saingannya, itu budaya lokal. Namun budaya luar turut mewarnai juga perkembangan ini, seperti liberalisme, komunisme, pragmatisme, marheanisme, sekulerisme, dan lain sebagainya.

*Keempat*, pendekatan politik trikotomi. Allan Samson adalah orang yang mengembangkan pendekatan ini. Dalam aliran ini menjelaskan bahwa

---

<sup>37</sup>Nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam Alquran, yakni: (1). Ketuhanan yang Maha Esa '*Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa*' (Q.S. al-Ikhlash/112 : 1), (2). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab '*maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hendaklah kamu jadi manusia yang adil*' (Q.S. an-Nisa/4 : 135), (3). Persatuan Indonesia '*dan kami jadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal*' (Q.S. al-Hujurat/49 : 13), (4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan '*sedangkan keputusan mereka diputuskan dengan musyawarah*' (Q.S. asy-Syu'ara/42 : 38), (5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia '*Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku Adil dan berbuat kebajikan*' (Q.S. an-Nahl/16 : 90).

karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka menjadikan Islam sebagai norma kehidupannya terutama dalam kehidupan berpoliticnya, skema politik santri di bagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*, Fundamentalis, yaitu agama merupakan sebuah ketetapan yang mesti diperjuangkan dalam kehidupan termasuk negara. *Kedua*, Reformis, yaitu agama merupakan dapat hidup di atas perbedaan budaya, selagi budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, dengan kata lain keberadaan Islam di tengah-tengah masyarakat tidak serta merta menghilangkan budaya lokal, kelompok ini bersifat fleksibel dan mampu mempertahankan keidealannya. *Ketiga*, Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepiintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berpikir atau alat negosiasi dalam politik.

*Kelima*, pendekatan politik kultural atau diversifikasi. Menurut Emerson Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang terhebat di Indonesia ini menggambarkan kembali energi politik umat Islam kedalam kegiatan non politik Islam kultural akan muncul Islam yang lebih simpati dan substansi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik.<sup>38</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan politik kultural diversifikasi dikarenakan dalam pendekatan ini menggambarkan dan sesuai dengan tema penelitian yang penulis teliti, sehingga pendekatan ini sangat relevan dan sesuai dengan kajian yang sedang penulis teliti.

## 2. Informan Penelitian

Informan ialah orang yang memberikan informasi tentang data/ informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, karena melalui informan maka data/informasi primer yang diperlukan dapat diperoleh.<sup>39</sup> Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang yang dianggap mampu memberikan keterangan. Informan ditentukan berdasarkan purposif yaitu ditentukan berdasarkan kriteria

<sup>38</sup>Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 180.

<sup>39</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h., 6

yang dimiliki oleh informan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti guna mendapatkan data empiris di lapangan. Adapun informannya adalah sebagai berikut:

1. Husaini M. Hasan selaku tokoh atau sumber primer didalam penelitian ini.
2. Prof. Dr. Hasyimsayh Nasution, M.Ag selaku Pakar Politik Islam dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Yusuf Peureulak adalah orang yang dekat dengan Husaini M. Hasan
4. Assoc, Prof. Zuly Qodir. Pengamat Politik Islam serta akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Haekal Afifa, S.IP, adalah orang dekat Husaini M. Hasan.
6. M. Nur Juli adalah orang yang pernah berjuang bersama Husaini M. Hasan.
7. Assoc. Prof. Al Chaidar. Pengamat Politik Aceh, akademisi Universitas Malikussaleh Aceh serta penulis buku DI/TII.

#### **a. Sumber Data**

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lyn, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Arikunto menyebutkan bahwa: “sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh”<sup>40</sup> sedangkan menurut Sugiyono bahwa “ bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder”.<sup>41</sup> Oleh karena itu data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperoleh dari berbagai data baik data primer maupun data sekunder dimana :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun pengamatan langsung

<sup>40</sup>Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 129

<sup>41</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2009), h., 156

oleh penulis yang sifatnya relative lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan (sample) yang penulis tentukan untuk penelitian ini. Data primer merupakan data hasil dari wawancara maupun data tertulis yang merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang berupa daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman pada saat wawancara berlangsung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data-data tersebut seperti: buku-buku teoritis, makalah-makalah ilmiah, laporan-laporan, arsip-arsip, dan berbagai aturan dengan berbagai variabel yang diteliti. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber sebagai sumber data primer. Sedangkan perolehan data juga diperoleh dari sumber data yang tidak langsung kepada peneliti, misalnya dalam bentuk dokumen sebagai sumber data sekunder. Maka prosedur pengumpulan data dapat dilakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono, menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*indept interview*)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan secara bebas dan terpimpin, yaitu wawancara dilakukan bebas, namun agar wawancara dapat terfokus pada objek penelitian

maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini, peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam berbagai situasi, peneliti dapat meminta informan untuk menyetujui pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Untuk penelitian lebih lanjut nantinya, baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain, berharap dapat wawancara dengan para praktisi atau informan yang telah menguasai bidang yang ingin diteliti. Dalam metode ini, adakalanya wawancara dilakukan lebih dari sekali kepada para informan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data secara dokumen dilakukan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan pengelolaan sampah untuk memperoleh landasan teoritis.

### c. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik analisa data merupakan cara yang sangat penting. Data yang dianalisis secara kualitatif, serta kutipan dari hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis data. Analisa data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data, yang menurut Maloeng,<sup>42</sup> melalui empat tahap pengumpulan data, adalah :

#### 1. Data Koleksi.

Tahap ini mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan. Koleksi data merupakan suatu tahap dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

---

<sup>42</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010), h., 5

## 2. Reduksi Data.

Tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah dipilah kemudian disederhanakan. Data yang tidak diperlukan dipisahkan agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

## 4. Penarikan kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

## G. Landasan Teori

Teori diperlukan sebagai acuan analisis dan juga menerawang realita yang ada. Menurut pengertiannya, teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.<sup>43</sup> Dalam melakukan penelitian social yang guna untuk menelaah atau menganalisis fenomena-fenomena yang ditemukan dalam hasil penelitian, maka harus digunakan landasan teori, secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu: *pertama*, menjelaskan (*explanation*), *kedua*, meramalkan

---

<sup>43</sup>Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 43

(*prediction*), *ketiga*, pengendalian (*control*) suatu gejala.<sup>44</sup> Sementara itu dalam penelitian kualitatif teori berfungsi untuk memperkuat peneliti sehingga peneliti mempunyai kemampuan untuk menggali informasi secara lengkap, mendalam dan mampu mengkonstruksikan temuan-temuannya. Dalam penelitian ini ada sejumlah teori dan konsep yang harus dijelaskan, yakni: Teori Pemikiran Politik, Teori Negara, Konsep Negara Bangsa, Negara Islam dan Negara Islam Aceh dan Aktivesme Politik.

### 1. Teori Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan umat. Pengertian ini sama sekali berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh para pemikir barat. Para pemikir politik barat mendefinisikan politik sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, menjaga serta melaksanakan kekuasaan itu. Islam dengan pemikiran politiknya yang memang benar-benar peduli terhadap rakyat tanpa mengaharap imbalan sedikitpun. Plato dalam Francis Mac Donald berpendapat bahwa pemikiran adalah hakikat yang besar dalam wujud ini yang seandainya penulis tidak pedulikan maka seluruh realitas ini menjadi hilang pula. Menjelaskan hal itu dalam apa yang dikenal dirinya sebagai teori ide, kemudian dirinya dibentuk istilah idealis. Ide ini menurut Plato tidak terikat dengan waktu dan tempat (dengan demikian berarti bukan makhluk). Kebenaran dan kebaikan bersinar maka mata batin rahani akan dapat melihat alam ide, seperti halnya mata melihat suatu materi dengan melalui cahaya matahari.<sup>45</sup>

Aristoteles dalam J. A. K Thomson berpendapat yang berbeda dengan Plato dalam hal ini, dengan menilai pemikiran ide mutlak ini sebagai pemikiran yang dipenuhi ketidakjelasan dan kesimpangiuran. Menafsirkan fenomena kehidupan dan memberikannya makna dan arah kehidupan dengan mengembalikan kepada kekuatan yang tidak mempunyai bentuk dan membutuhkan penafsiran. Aristoteles menolak pemikiran ide dan menggantikannya dengan pemikiran asensi. Sebagai ganti dari ungkapan yang mengatakan bahwa hakikat-hakikat mutlak bagi sesuatu terdapat dalam dunia ide,

---

<sup>44</sup>Bambang Prasetyo dan Lna Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h, 12.

<sup>45</sup>Tijani Abdul Qadir Hamid. *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*. (Jakarta: Insa Media Press 2001), h., 13

maka harus dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai esensi, dan hakikat sesuatu itu terletak dalam esensinya. Sebagai ganti ungkapan yang mengatakan bahwa penguasaan harus keluar dari gua sosial untuk melihat hakikat-hakikat sesuatu didunia ide dan Sesutu itu menjadi penguasa yang mempunyai kemampuan untuk memimpin republik, maka harus dikatakan bahwa individu seras sosial dan Negara, seluruhnya adalah wujud yang berusaha untuk mewujudkan keberadaannya. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa dan diaplikasikan ditengah masyarakat bukanlah undang-undang yang turun dari dunia ide namun undang-undang yang ditentukan dan diambil dari dunia realitas sosial.<sup>46</sup>

Pemikiran politik adalah aplikasi rasional manusia seperti halnya pemikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan kehidupan, penyusunan premis-premis yang telah diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia berlabu dari pandangan umum sistem kepercayaannya, dan kerangka rujukannya yang menjadi acuan pengambilan sumber, macam-macam metodologi serta filsafat pengetahuannya maka kaum muslimin mempunyai pemikiran politik yang berlabu dari pandangannya dan dijelaskan kaidah-kaidahnya dalam pokok-pokok pemikiran.<sup>47</sup>

## 2. Teori Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Roger H. Soltau Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat (*the state is a agency or authority managing or controlling these*

---

<sup>46</sup>Tijani Abdul Qadir Hamid. *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*, h. 13-14

<sup>47</sup>Tijani Abdul Qadir Hamid. *Pemikiran Politik dalam Al-Quran..* h., viii

(*common*) *affairs on behalf of and in the name of the community*). Max Weber berpendapat bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Robert M. Maclver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat serta dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu sistem pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Definisi umum Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga Negara ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa (*control*) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.<sup>48</sup>

Secara singkat terdapat dua tugas Negara, yakni *pertama*, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial ataupun bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonism yang membahayakan. *Kedua*, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

### 3. Konsep Negara Bangsa

Jurgen Habermas membagi *Nation-State* menjadi empat macam. *Pertama*, Nation State yang lahir berdasarkan Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini terkenal sebagai perjanjian yang mengakhiri “Perang Tiga Puluh Tahun” antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebelumnya, banyak sekali terjadi peperangan seperti Perancis vs Spanyol, Perancis vs Belanda, Swiss vs Jerman, Spanyol vs Belanda, dan sebagainya. Dengan adanya Perjanjian tersebut, telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik, mengakui keabsolutan gereja, diakuinya kemerdekaan Nederland, Swiss dan Negara-negara kecil di Jerman. *Kedua*, kontras dengan yang pertama, Jurgen menyebutnya “*belated-nation*” negara yang terlambat. negara-bangsa (*nation-states*) yang muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Konsep Negara bangsa yang lahir karena semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan hakiki sebagai suatu negara. Semangat

---

<sup>48</sup>Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h.,48-49

ini timbul seiring dengan timbulnya Revolusi Perancis serta penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte.

Generasi ketiga negara bangsa adalah yang lahir dari proses dekolonialisme, kebanyakan di Afrika dan Asia. Negara yang berdiri atas dasar batas-batas kolonial penjajah sebelumnya. kedaulatan yang diperoleh berakar dalam identitas nasional yang melampaui perbedaan suku. Kelompok yang terakhir adalah negara bangsa yang lahir dari kolapsnya Soviet. Negara-negara baru yang muncul dari pecahannya Soviet.<sup>49</sup> Sudah jelas, Indonesia masuk dalam kategori ketiga. Negara bangsa yang lahir setelah merebutnya dari tangan kolonialisme. Bangsa Indonesia lahir dari perjalanan panjang menemukan sebuah kesadaran untuk bersatu di bawah tekanan dan pengaruh besar kolonialisme. Sama seperti disebutkan oleh Benedict Anderson, bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan. Komunitas politik itu dikatakan sebagai *imagined*, karena anggota komunitas itu tidak pernah saling mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar. Yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas tersebut adalah hanya gambaran tentang komunitas mereka. Suatu bangsa akan terbentuk, jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan.<sup>50</sup>

#### 4. Negara Islam

Negara Islam merupakan Negara yang didirikan atas dasar keyakinan (aqidah), bukan atas dasar letak geografis, etnis ataupun aspek-aspek alam lainnya. Negara Islam bersifat universal, meskipun bersifat universal (*'alamiyyat*), tidak harus berwilayah seluruh penjuru bumi untuk bisa disebut sebagai sebuah Negara Islam. Negara Madinah hanya mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas namun sudah bisa disebut sebagai sebuah Negara Islam. Sebuah Negara ideal yang terpenting adalah bahwa wilayah tidak boleh dikuasai oleh lebih dari satu payung kekuasaan yang sama tinggi. Hasan al-Banna berpendapat bahwa Negara Islam

---

<sup>49</sup>Jugen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, (Massachusetts: The MIT Press, 1999), h. 105-107

<sup>50</sup>Bill Ashcroft (Edt), *The Post-Colonial Studies Reader*, (New York: Routledge, 1995), h. 123-124

adalah Negara yang merdeka, tegak diatas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosial, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus dan melakukan dakwah yang bijak kesegenap umat manusia. Negara Islam berbentuk khalifah. Khalifah adalah bentuk kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khalifah didalam Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di Negara-negara Islam.<sup>51</sup>

Fazlur Rahman berpendapat Negara Islam merupakan sebuah wadah untuk menciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia dalam Islam, Negara hanyalah alat maupun sarana untuk menegakkan hukum-hukum yang telah digaris oleh Allah SWT. Dalam Negara Islam kedaulatan itu milik Allah yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk rakyat. Jadi Negara Islam itu jelas tidak sesuai dengan politik yang digembar-gemborkan seperti sekarang ini yakni demokrasi.<sup>52</sup> Al-Maududi berpendapat bahwa konsep Negara dilandasai oleh tiga dasar atau anggapan: *pertama*, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali kedalam sistem Islam dengan merujuk kepada pola politik Al-Khulafaur Al-Rasyidin. Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam. *Kedua*, kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Kedaulatan tertinggi dalam politik Islam ada ditangan Tuhan, sedangkan manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. *Ketiga*, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>53</sup>

Negara hanya merupakan instrument pembaharuan yang terus menerus, yang didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Pemerintah yang memegang kekuasaan (imam) diberi hak untuk ditaati dalam kapasitasnya sebagai agen politik yang diciptakan untuk

---

<sup>51</sup>Anwar Al-Jundi, *Biografi Hasan Al-Banna*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). h., 500

<sup>52</sup>Juniarso Ridwan, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke-20*. (Bandung: Nuansa, 2010). h., 106

<sup>53</sup>Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet I. (Jakarta: UI Press, 1990). h., 166

menangak hukum-hukum Tuhan, bertindak sesuai dengan kemampuannya. Negara Islam dan konsep Negara dalam Islam merupakan instrument reformasi ideologi. Ketentuan inilah yang menyebabkan Negara wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang menyakini ideologi Islam dan hukum ilahi. Hukum disini mengandung arti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat adil dan sejahtera, bukan hukum-hukum administratif atau hukum yang lainnya dalam pengertian ini manusia diperbolehkan untuk membuat peraturan.

Hubungan Islam dan Negara-bangsa (*nation-state*) dalam dunia Islam pada zaman klasik belum diperbincangkan karena pada waktu itu belum mengenal batasan wilayah kekuasaan secara geografis. Baru kemudian pada abad pertengahan ketika Era Renaissance muncul di Eropa, menurut Hans Kohn pada masa inilah kebangsaan dianggap sebagai sumber kehidupan kebudayaan.<sup>54</sup> Pada abad-abad sebelumnya masih menurut Hans Kohn bahwa agamalah yang dianggap sebagai segenap kehidupan dan rohani. Hubungan Islam dan Negara menurut Bahtiar Effendy seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan Negara, seolah-olah keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi.<sup>55</sup>

Hubungan antara Islam dengan politik memiliki dua sisi, sisi internal adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsi, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakuakn kekeliruan. Sisi eksternal adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengatarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya ditengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya. Negara menemukan wujud aslinya sebagai organisasi politik yang dibentuk atas dasar dan tujuan tertentu oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu secara tetap dan

---

<sup>54</sup>Hans Kohn, *Nasionalisme, Arti dan Sejarah*. (Jakarta: PT Pembangunan, 1976). h., 13

<sup>55</sup>Bahtiar, Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 12

mempunyai struktur pemerintahan serta kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan.

Berdasarkan hal diatas, maka diperbincangkan gerakan politik (nasionalisme) menjadi aktual dikalangan Negara-negara muslim seiring perluasan kolonialisme-imperialisme barat, baik secara praktik maupun secara teoritis, perbincangan tersebut sedikit demi sedikit mengalami pergeseran sehingga yang awalnya berupa persinggungan politik antara Islam dan nasionalisme menjadi hubungan politik antara Islam dan Negara-bangsa (*nation-state*). Dalam perkembangan politik Islam terdapat tiga pandangan, yaitu: *Pertama*, yang berpendirian bahwa Islam merupakan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aspek politik-kenegaraan. *Kedua*, yang beranggapan bahwa agama (Islam) hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan sehingga memisahkan persoalan agama dan Negara. *Ketiga*, yang berpendapat bahwa Islam hanya membuat prinsip-prinsip umum dan tata nilai moral serta etika dalam kehidupan kenegaraan, sedangkan aturan operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada umat.

### **5. Aktivisme Islam**

Aktivisme Islam berakar dalam simbolisme, bahasa, dan sejarah budaya masyarakat Muslimdan, sebagai akibatnya, hal itu beresonansi kuat di kalangan penduduk yang makin kecewa karena eksklusi politik, kesulitan ekonomi, perasaan ketidakberdayaan di hadapan kekuatan-kekuatan luar dan proses globalisasi yang tak berwajah. Banyak kerja aktivisme Islam dicurahkan untuk menciptakan bingkai-bingkai yang memotivasi, menginspirasi, dan menuntut loyalitas. Namun, karena aktivisme Islam beroperasi dalam konteks-konteks represi, dinamika pemingkaiannya itu mungkin berbeda dari proses-proses serupa dalam demokrasi-demokrasi liberal Barat. Karena karya tentang wilayah penelitian ini di dunia Muslim kini baru dimulai, kemungkinan perbedaan ini jelas merupakan suatu persoalan empiris. Para spesialis tentang aktivisme Islam, yang secara historis sangat mengetahui argumen-argumen dan bingkai-bingkai

aktivisme, dapat menggunakan keahlian mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengembangkan teori.<sup>56</sup>

Terlepas dari berbagai kemiripan ini, sebagian besar studi tentang aktivisme Islam masih terisolasi dari begitu banyak perkembangan teoretis dan konseptual yang muncul dari penelitian tentang gerakan sosial dan politik perseteruan. Sebaliknya, sebagian besar publikasi tentang aktivisme Islam lebih merupakan analisis deskriptif tentang ideologi, struktur, dan tujuan-tujuan dari beragam aktor Islam atau sejarah gerakan-gerakan tertentu. Dinamikadinamika sosiologis yang lain masih tetap tidak dikaji atau diremehkan sebagai sesuatu yang bergantung pada orientasi ideologis Islam yang unik, dan dengan demikian secara implisit mengesensialkan aktivisme Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami secara komparatif dan mengekalkan keyakinan tentang eksepsionalisme Islam. Ketika analisis komparatif digunakan (di luar kajian atas beragam contoh aktivisme Islam), sehingga dijabarkan pada perbandingan dengan “fundamentalisme-fundamentalisme keagamaan” lain yang sama-sama memiliki fondasi ideologis dan orientasi keagamaan yang mirip, dan dengan demikian menegaskan keterbandingan gagasan dan bukan mekanisme aktivisme. Akibatnya adalah bahwa karya kesarjana tersebut cenderung mengabaikan berbagai perkembangan dalam penelitian gerakan sosial yang dapat memberikan sumbangan teoretis pada banyak isu yang relevan dengan aktivisme Islam.<sup>57</sup>

Rintangan lain terhadap pembentukan teori dalam studi tentang aktivisme Islam adalah bahwa penelitian multidisipliner tidak disatukan oleh suatu agenda penelitian bersama. Terpecah-pecah dalam beragam disiplin, publikasi-publikasi tentang aktivisme Islam cenderung mengikuti rangkaian pertanyaan penelitian, kerangka teoretis, dan metodologi yang sempit, yang masing-masingnya ditentukan oleh suatu fokus disiplin tertentu. Sebagian besar ilmuwan politik, misalnya, lebih tertarik kepada pertanyaan bagaimana Islam memengaruhi negara dan politik; para sosiolog tertarik untuk mengkaji akar-akar demografis para anggota baru kalangan Islamis; para sarjana studi keagamaan umumnya berfokus

---

<sup>56</sup>Jenkins J. Craig. “Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements.” Dalam *Annual Review of Sociology* 9, h, 527-553.

<sup>57</sup>Antoun Richard T., dan Mary E. Hegland (ed.). *Religious Resurgence: Contemporary Cases in Islam, Christianity, and Judaism*. (Syracuse: Syracuse University Press, 1987)

pada gagasan-gagasan yang memotivasi aktivisme Islam; dan kalangan sejarawan menguraikan sejarah kelompok-kelompok Islamis tertentu. Akibatnya, fragmentasi disiplin keilmuan telah menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang masing-masing elemen tertentu dari aktivisme Islam, tetapi hal itu berlangsung tanpa memunculkan modelmodel atau kerangka-kerangka yang menjelaskan bagaimana semua elemen ini berpadu bersama, berinteraksi, dan memengaruhi pola-pola perseteruan Islam. Sebaliknya, sebuah agenda penelitian bersama akan menghasilkan serangkaian pertanyaan-kerja, konsep, dan garis besar teori bersama yang membantu memberikan suatu pemahaman yang komprehensif dan saling-terkait tentang aktivisme Islam.<sup>58</sup>

Ketersebaran aktivisme Islam dan percabangan-percabangan globalnya (baik di dunia Muslim maupun non-Muslim, khususnya sejak 11 September) berarti bahwa kelemahan ini penting diperhatikan. Melihat beragamnya aktor-aktor kolektif yang beroperasi atas nama “Islam” (kelompok-kelompok ibadah, kaum teroris, lingkaran-lingkaran studi, partai-partai politik, LSM-LSM, perkumpulan-perkumpulan kebudayaan, dan lain-lain), seseorang mungkin akan mengeluarkan klaim kuat bahwa aktivisme Islam merupakan salah satu contoh aktivisme paling umum di dunia. Dengan demikian, ini merupakan topik yang penting, dan mungkin menantang teori gerakan sosial untuk memikirkan kembali dan memperbaiki asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulannya tentang perseteruan.<sup>59</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan disertasi ini dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Sistematika penulisan tesis ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah yang dipakai

---

<sup>58</sup>Lawrence Bruce. *Defenders of God. The Fundamentalist Revolt against the Modern Age*. (Columbia: University of South Carolina, 1989)

<sup>59</sup>Kitschelt Herbert P. “Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies.” Dalam *British Journal of Political Science* 16, h, 57-85.

peneliti, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, penulis menekankan kajian tentang bagaimana Husaini M. Hasan dalam memperjuangkan pemikiran dan aktivisme politik serta juga konsep *Aceh Islamic State*. Target capaian dari bab ini adalah menguraikan pemikiran dan aktivisme politik secara sistematis.

Bab II membahas tentang biografi tokoh yang terdiri dari latar belakang Pendidikan tokoh, konteks sosial dan pengaruhnya. Kajian biografi tokoh tersebut penulis gunakan sebagai alat untuk menganalisis, sehingga memudahkan penulis dalam mengkaitkan antara teori dan realitas. Oleh karena itu, capaian yang hendak dibuat oleh penulis sinkronisasi antara teori dan fenomena yang sedang diteliti.

Bab III membahas tentang pemikiran dan aktivisme politik dan pembahasan yang menguraikan secara detail tentang poin-poin pertanyaan yang meliputi: (A) Pemikiran Husaini M. Hasan, (B) Aktivisme politik Husaini M. Hasan, (C) *Aceh Islamic State*.

Bab IV membahas tentang analisis pemikiran dan aktivisme politik dan pembahasan yang menguraikan secara detail tentang poin-poin pertanyaan yang meliputi: (A) Pemikiran Husaini M. Hasan, (B) Aktivisme politik Husaini M. (C) Husaini M. Hasan dan (D) *Aceh Islamic State*.

Bab V membahas rumusan, kesimpulan penelitian dan saran-saran. Adapun target yang akan dicapai adalah penulis dapat memberikan sebuah solusi tentang Pemikiran dan Aktivisme Politik Husaini M. Hasan tentang *Aceh Islamic State*.